

## Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Aparat Pemerintah Kecamatan Semarang Barat

**Novita Puspita Shanti\*, M G Kentris Indarti**

Akuntansi, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

\* novitashanti5@gmail.com

### Riwayat Artikel:

*Tanggal diajukan:*  
11 Juli 2021

*Tanggal diterima:*  
24 Oktober 2021

*Tanggal dipublikasi:*  
30 Desember 2021

**Kata kunci:** akuntabilitas pengelolaan dana desa; komitmen organisasi pemerintah desa; kompetensi aparatur desa; sistem pengendalian internal.

### Pengutipan:

Shanti, Novita Puspita & Indarti, M G Kentris (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Aparat Pemerintah Kecamatan Semarang Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 456-469.

**Keywords:** accountability of village fund management; commitment of village government organizations; competence of village officials; internal control systems.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengurus pemerintahan desa di Kecamatan Semarang Barat menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat masih belum optimal. Kurangnya kompetensi aparatur desa atau kompetensi sumber daya manusia menjadi penyebab permasalahan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa Kecamatan Semarang Barat masih belum bisa memanfaatkan dana desa secara maksimal sehingga mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa pada tahun berikutnya. Selain itu kesalahan administrasi yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa juga disebabkan karena Aparat desa di Kecamatan Semarang Barat yang rata-ratanya berlatar SMA dan sudah tua. Populasi dari penelitian ini adalah kantor Kecamatan Semarang Barat. Analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 70 responden dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Abstract

*This study was conducted to determine the factors that affect the accountability of village fund management. Village administration officials in West Semarang District stated that the accountability of village fund management in West Semarang District was still not optimal. Lack of village apparatus competence or human resource competence is the cause of the problem of not achieving village fund management accountability. The village administration of West Semarang Sub-district is still unable to utilize village funds optimally, resulting in delays in the disbursement of village funds the following year. In addition, administrative errors that caused delays in the disbursement of village funds were also caused by village officials in the West Semarang District, who on average graduated from high school and were old. The instrument of study is in the form of questionnaires. The population in this study is the village officials in the west semarang district. The sampling technique this study used a purposive sampling method with 70 respondents and analyzed by multiple linear regression. The results of the study indicate that the variables village officials competence, commitment of village government organizations, internal control systems have a significant positive effect on the village fund management accountability.*

## Pendahuluan

Masyarakat dalam pengelolaan dana desa perlu mengetahui dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa perlu memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa tersebut. Pemerintah harus mempunyai sikap transparan, jujur, adil dan bijaksana. Sikap yang telah dijelaskan diatas adalah akuntabilitas. Bagi pemerintah akuntabilitas wajib dimiliki karena dengan adanya akuntabilitas bisa menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan segala aktivitas yang telah dilakukan (Widyatama et al., 2017). Suatu pemerintah dikatakan akuntabel apabila mampu menjelaskan kondisi dalam keputusan yang telah diambil dan aktivitas yang telah dilakukan. Informasi diberikan dengan handal, akurat, pertanggungjawaban dan tepat waktu adalah menunjukkan akuntabilitas yang baik (Oka et al., 2015).

Pemerintah desa harus bertanggungjawab dalam masalah yang berhubungan dengan keuangan yang telah tersusun di anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dimana dana desa termasuk komponennya. Akuntabilitas juga bisa menunjukkan apakah aparatur desa tersebut bisa bekerja dengan baik, benar, etis dan bertanggungjawab atas kemungkinan yang bisa terjadi seperti penyelewengan dana desa dan dapat mengurangi dana desa yang dimanfaatkan tidak tepat sasaran. Fokus utama aparat desa dalam mengelola dana desa adalah akuntabilitas karena akuntabilitas membuktikan bahwa visi misi undang-undang desa berhasil dan tercapai dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, kuat, berkeadilan dan mampu mengurus atau mengatur sendiri kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, adanya akuntabilitas bisa menunjukkan bahwa aparatur desa tersebut berhasil mengelola dana desa dengan menunjukkan tanggungjawabnya (Pahlawan et al., 2020).

Pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa karena aparatur desa yang memiliki kompeten dan kemampuan mengelola dana desa akan lebih mudah untuk menjalankan tugasnya. Penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat dikurangi dengan adanya aparatur desa yang berkompeten. Salah satu syarat utama agar akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa agar terlaksana secara maksimal adalah kompetensi yang dimiliki aparatur desa (Widyatama et al., 2017).

Selain kompetensi yang harus dimiliki, aparatur desa juga harus didukung dengan mempunyai komitmen yang kuat agar pekerjaan bisa berjalan dengan maksimal. Komitmen organisasi merupakan elemen terpenting terhadap akuntabilitas (Mada et al., 2017). Komitmen organisasi merupakan suatu dimensi perilaku dimana perilaku tersebut bisa digunakan untuk karyawan dalam memberikan kekuatan untuk bertahan dalam suatu perusahaan. Pentingnya menciptakan komitmen karyawan yang tinggi terutama di perusahaan nonprofit dengan skala gaji yang tidak kompetitif (Aprilya & Fitria, 2020).

Pembangunan pemerintah melalui perencanaan desa dicapai dengan mengalokasikan dana desa ke seluruh desa di Indonesia dengan jumlah dana desa yang sangat tinggi. Pemerintah menganggarkan dana desa yang terbagi dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp 127,75 triliun. Tahun 2015 dana yang dianggarkan berjumlah Rp 20,77 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun. Menurut evaluasi penyaluran dan penggunaan desa tahun 2015, dana desa dari kabupaten atau kota ke desa dalam penyalurannya masih rendah dan mengalami keterlambatan. Terkait dengan penggunaannya, masih ada dana desa yang digunakan diluar prioritas, pihak ketiga melakukan segala kegiatan di bidang konstruksi, tidak memanfaatkan hasil pengadaan

Masyarakat dalam pengelolaan dana desa perlu mengetahui dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Maka dari itu, pemerintah desa perlu memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa tersebut. Dalam pengelolaan pemerintah harus mempunyai sikap transparan, jujur, adil dan bijaksana. Sikap yang telah dijelaskan diatas adalah akuntabilitas. Bagi pemerintah akuntabilitas wajib dimiliki karena dengan adanya akuntabilitas bisa menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan segala aktivitas yang telah dilakukan (Widyatama et al., 2017).

Tahun 2017 dana desa yang diperoleh provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 6,3 Triliun, dimana Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan alokasi dana desa paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Terdapat 7.890 desa dari 527 kecamatan dan 29 kabupaten di Jawa tengah. Jumlah dana desa yang diperoleh perdesa rata-rata berjumlah 817 juta. Besarnya alokasi dana tersebut membuat banyak perangkat desa yang melakukan penyelewengan dana desa. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan di 4 kabupaten di Jawa tengah terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa yang diduga dilakukan oleh aparat desa yaitu di Kabupaten Brebes, Grobogan, Temanggung dan Jepara. Bentuk-bentuk penyelewengan dana desa tersebut adalah aktivitas fiktif, markup, pengeluaran fiktif, tidak ada penggunaan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan untuk tujuan pribadi atau kelompok (nasional.kompas.com).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia et al., 2019), (Tarjo, 2019), (Nurdin & Wijaya, 2019) mengatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dari beberapa penelitian tersebut maka peneliti melakukan pengembangan dari penelitian (Aulia, 2018) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota". Penelitian ini mempunyai persamaan dengan menggunakan dua variabel dan beberapa metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah sampel penelitian yang diambil dari aparat pemerintah desa Kecamatan Semarang Barat. Perbedaan kedua adalah penambahan variabel sistem pengendalian internal. Alasan mengapa penulis menambahkan variabel tersebut karena sistem pengendalian berpengaruh terhadap pemerintah desa dalam melakukan pengambilan keputusan serta bisa berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut (Sweetenia et al., 2019).

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pertanyaan yang ditimbulkan yaitu: 1). Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat?, 2). Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat?, 3). Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat?. Selain itu penelitian ini bertujuan : Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat, Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat, Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang Barat.

### *Teori Stewardship*

Menurut (Donaldson & Davis, 1991), teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidaklah termotivasi pada tujuan individu tetapi lebih menunjukkan mengenai sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, maka dari itu teori ini memiliki dasar psikologis dan sosiologis yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward dan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Dimana perilaku steward berusaha mencapai sasaran organisasinya dengan tidak meninggalkan organisasinya. Teori ini didesain bagi peneliti yang digunakan untuk menguji para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dengan memberikan motivasi dengan bertindak baik untuk diberikan kepada prinsipalnya.

Teori ini lebih tepat digunakan pada instansi pemerintahan yang tidak berorientasi pada laba namun lebih mengarah kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya. Teori ini sudah menggambarkan secara jelas dimana motivasi individu dalam melakukan tindakan di suatu instansi atau perusahaan yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada principal, sehingga teori ini cocok diterapkan pada penelitian ini.

Nilai yang tertanam pada teori ini yaitu memberikan dampak yang baik dalam menjalankan pemerintah yang sehat. Bahwasanya pemerintah desa (steward) sebagai

lembaga yang dipercaya untuk bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat (principals) dapat tercapai secara maksimal khususnya dalam pengelolaan dana desa.

#### *Akuntabilitas*

Menurut (Umaira & Adnan, 2019) akuntabilitas melibatkan kemampuan yang dimiliki aparat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan dan berhubungan dengan pembangunan pemerintahan desa. akuntabilitas dapat tercapai apabila terdapat Partisipasi dari masyarakat dengan menyampaikan aspirasi dan kontribusi dalam proses pengelolaan dana desa yang diperoleh. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran yang berdasarkan dengan asas pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo dalam (Endrayani et al., 2014) dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi 5 bagian yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

#### *Kompetensi Aparatur Desa*

Kompetensi adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas. Kompetensi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akuntabilitas. Menurut (Widyatama et al., 2017) kompetensi bisa diartikan dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuan pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu dalam pencapaian pekerjaannya. Kompetensi Berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2007 pasal 2 terdapat 2 syarat yang harus dimiliki perangkat desa yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum yang pertama yaitu latar belakang pendidikan yang paling rendah adalah sekolah menengah umum atau yang sederajat, syarat yang kedua adalah usia 20 sampai dengan 42 tahun dimana usia tersebut merupakan usia yang produktif, diharapkan dapat menambah tingkat akuntabilitas pada pemerintah desanya. Sedangkan syarat khusus yang berkaitan dengan kompetensi adalah perangkat desa harus memiliki sikap dan nilai budaya yang baik.

#### *Komitmen Organisasi Pemerintah Desa*

Komitmen organisasi sangat berhubungan dengan akuntabilitas. Menurut (Nurdin & Wijaya, 2019) komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan dengan organisasi yang dapat dilihat dengan kuatnya kepercayaan dan penerimaan atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan kuatnya keinginan untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Terdapat keinginan yang kuat dari suatu individu untuk tetap berada dalam organisasi tersebut. Dengan mempunyai pandangan di suatu organisasi tidak semata-mata karena uang dan kewajiban, melainkan karena keinginan. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap iklim kerja dimana iklim tersebut akan membentuk menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab

#### *Sistem Pengendalian Internal*

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang dilakukan secara terus menerus guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, mengamankan asset dan menaati peraturan sesuai dengan perundang-undangan (Sweetenia et al., 2019). Dalam pengelolaan dana desa sistem pengendalian internal sangat diperlukan karena untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak pada pengelolaan dana desa tersebut. Diharapkan sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa agar mampu dalam pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemerintahan sistem pengendalian internal merupakan factor terpenting karena berpengaruh terhadap

pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berhubungan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut.

#### *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik ketika pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki aparatur desa.

Penelitian yang dilakukan (Aulia, 2018) menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Penelitian (Pramayoga & Ramantha, 2020) juga membuahkan hasil yang sama, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Tarjo, 2019) yang juga melakukan penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin baik kompetensi yang dimiliki aparat desa maka akan semakin baik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan (Rosyidi, 2018) yang menyimpulkan bahwa semakin banyak aparatur desa yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis pertama dapat diajukan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### *Pengaruh Komitmen Pemerintah Organisasi Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

Komitmen organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan pekerjaan terhadap nilai organisasi, kerelaan pekerja dalam membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Aprilya & Fitria, 2020). Menurut (Mada et al., 2017) Komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa baik semua kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan pelayanan yang akan menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship dimana aparatur desa harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi guna memenuhi kewajiban terhadap masyarakat yaitu memberikan pelayanan, semakin tinggi komitmen organisasi pada setiap individu maka akan berpengaruh terhadap tingkat kecepatan dan ketepatan kerja yang dimilikinya sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Penelitian yang dilakukan (Mada et al., 2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin tinggi komitmen pemerintah desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Penelitian (Nurdin & Wijaya, 2019) juga membuahkan hasil yang sama, yaitu komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Aulia 2018) juga menyimpulkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan (Tarjo, 2019) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen menjadi kunci utama dalam mempertanggungjawabkan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis kedua dapat diajukan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang dilakukan secara terus menerus guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, mengamankan asset dan menaati peraturan sesuai dengan undang-undang (Sweetenia et al., 2019). Dalam pengelolaan dana desa sistem pengendalian internal sangat diperlukan karena untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak pada pengelolaan dana desa tersebut. Diharapkan sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa agar mampu dalam pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemerintahan sistem pengendalian internal merupakan faktor terpenting karena berpengaruh terhadap pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berhubungan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa yang sebagai *steward* bisa mengarahkan semua kemampuan dan keahlian pemerintah desa yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal supaya laporan keuangan yang dihasilkan bisa berkualitas baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan (Rosyidi, 2018) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya sistem pengendalian internal menyatu pada setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan pimpinan dan pegawainya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan (Sweetenia et al., 2019) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Arfiansyah, 2020) yang juga melakukan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan (Yesinia et al., 2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis kelima dapat diajukan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### **Metode**

Teknik pengumpulan data menggunakan yang digunakan adalah wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Jenis data adalah data primer yang digunakan dan akan diuji adalah berupa kuesioner/angket. Sedangkan studi kepustakaan merupakan sumber data yang bisa diperoleh melalui beberapa cara diantaranya bisa bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dari internet sebagai referensi karena adanya keterkaitan dengan permasalahan penelitian atau masalah yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi perencanaan, dan kepala seksi kesejahteraan karena pihak-pihak tersebut berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Semarang Barat. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 25.

### *Definisi Operasional* Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban bagi setiap seseorang yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Perdana, 2018). Penelitian pada

instrument akuntabilitas diukur dengan skala likert 1-5 point yang terdiri dari 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat setuju, yang telah dikembangkan pada peneleitian terdahulu oleh (Perdana, 2018) berjumlah 5 pernyataan, yang terdiri dari 2 indikator yaitu kejujuran dan hukum dan indikator proses.

### Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi bisa diartikan sebagai pengetahuan, keahlian dan kemampuan sedangkan pada konteks manajemen sumber daya manusia istilah kompetensi diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu dalam pencapaian pekerjaannya (Widyatama et al., 2017). Instrument pada kompetensi aparat desa diukur dengan skala likert 1-5 point yang terdiri dari 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat setuju, yang telah dikembangkan pada peneleitian terdahulu oleh Perdana (2018) berjumlah 8 pernyataan, yang terdiri dari 3 indikator yaitu pengetahuan, kemampuan dan sikap.

### Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi merujuk pada suatu daya yang dimiliki seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya pada suatu organisasi (Nurdin & Wijaya, 2019). Komitmen organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan pekerjaan terhadap nilai organisasi, kerelaan pekerja dalam mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dan berkomitmen untuk tetap berada pada organisasi tersebut. Instrument pada komitmen organisasi pemerintah desa diukur dengan skala likert 1-5 point yang terdiri dari 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat setuju, yang telah dikembangkan pada peneleitian terdahulu oleh (Perdana, 2018) berjumlah 7 pernyataan, yang terdiri dari 3 indikator yaitu afektif, keberlanjutan dan normative

### Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang dilakukan secara terus menerus guna memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan efektif dan efisien, mengamankan aset dan menaati peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan (Sweetenia et al., 2019). Instrument pada sistem pengendalian internal diukur dengan skala likert 1-5 point yang terdiri dari 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat setuju, yang telah dikembangkan pada peneleitian terdahulu oleh (Rosyidi, 2018) dengan 10 pernyataan, yang terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Uji Statistik Deskriptif*

Analisis statistik diskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, system pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 1.

Statistik Deskriptif					
	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std.</b>
<b>Kompetensi</b>	70	5	49	35.75	4.813
<b>Komitmen</b>	70	22	32	28.46	2.320
<b>Sistem</b>	70	60	90	70.16	5.342
<b>Akuntabilitas</b>	70	18	28	24.74	2.225
<b>Valid N (listwise)</b>	70				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Dari tabel 1. diatas dapat diketahui gambaran jumlah jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing variabel penelitian. Pada variabel kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 5, nilai maksimum 49 dan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 35,75 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir pernyataan. Hal ini berarti nilai minimum dari variabel kompetensi aparat pengelola dana desa berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 pada skala likert. Apabila dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data yang cukup kecil dilihat dari deviasi standar sebesar 4,813.

Sedangkan variabel komitmen organisasi pemerintah desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 22, nilai maksimum 32 dan nilai rata-ratanya sebesar 28,46 dengan jumlah pernyataan sebanyak 9 butir pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel komitmen organisasi pemerintah desa berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 pada skala likert. Apabila dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden berada pada skala 3 dalam skala likert. Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data yang cukup kecil dilihat dari deviasi standar sebesar 2,320.

Variabel system pengendalian internal memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 60, nilai maksimum 90 dan nilai rata-rata 70,16 dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir pernyataan. Hal ini berarti nilai minimum dari variabel partisipasi masyarakat berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 pada skala likert. Apabila dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Selain itu juga terdapat penyimpangan data yang cukup kecil dilihat dari deviasi standar sebesar 5,342.

Sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 18, nilai maksimum 28 dan nilai rata-ratanya sebesar 24,74 dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 butir pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel komitmen organisasi pemerintah desa berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimumnya berada pada skala 5 pada skala likert. Apabila dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden berada pada skala 3 dalam skala likert. Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data yang cukup kecil dilihat dari deviasi standar sebesar 2,225

### *Uji Validitas*

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Menurut (Perdana, 2018) instrumen penelitian dikatakan valid jika semua item pembentuk pertanyaan dalam kuesioner memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel  $\geq 0,25$ . Dalam penelitian ini, pengujian validitas data dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation.

Tabel 2.

Uji Pearson Correlation

Item	Signifikan	Korelasi	Keterangan
X1_1	0,638	0,25	Valid
X1_2	0,561	0,25	Valid
X1_3	0,476	0,25	Valid
X1_4	0,353	0,25	Valid
X1_5	0,465	0,25	Valid
X1_6	0,500	0,25	Valid
X1_7	0,489	0,25	Valid
X1_8	0,456	0,25	Valid
X2_1	0,604	0,25	Valid
X2_2	0,599	0,25	Valid
X2_3	0,554	0,25	Valid



X2_4	0,507	0,25	Valid
X2_5	0,648	0,25	Valid
X2_6	0,450	0,25	Valid
X2_7	0,581	0,25	Valid
X2_8	0,421	0,25	Valid
X3_1	0,673	0,25	Valid
X3_2	0,695	0,25	Valid
X3_3	0,726	0,25	Valid
X3_4	0,641	0,25	Valid
X3_5	0,782	0,25	Valid
X3_6	0,701	0,25	Valid
X3_7	0,721	0,25	Valid
X3_8	0,743	0,25	Valid
X3_9	0,781	0,25	Valid
X3_10	0,765	0,25	Valid
Y_1	0,783	0,25	Valid
Y_2	0,626	0,25	Valid
Y_3	0,672	0,25	Valid
Y_4	0,827	0,25	Valid
Y_5	0,837	0,25	Valid
Y_6	0,748	0,25	Valid
Y_7	0,523	0,25	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Pearson Correlation untuk masing-masing variabel  $\geq 0,25$ , sehingga seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini valid untuk mengukur masing-masing variabel dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya.

#### Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menguji seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala ataupun pengukuran yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Cronbach's alpha. Jika nilai cronbach's alpha lebih dari atau sama dengan 0,50 maka reliabilitasnya tinggi dan terpenuhi (Ghozali, 2018).

Tabel 3.

#### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kompetensi Aparatur Desa	0,504	8
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	0,678	7
Sistem Pengendalian Internal	0,891	10
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,813	5

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Tabel 3. menunjukkan nilai cronbach's alpha variabel kompetensi aparatur desa sebesar  $0,504 > 0,50$ ; variabel komitmen organisasi pemerintah desa sebesar  $0,678 > 0,50$ ; variabel sistem pengendalian internal sebesar  $0,891 > 0,50$ ; variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar  $0,813 > 0,50$  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pengukuran dalam kuesioner adalah reliabel.

### *Uji Normalitas*

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Basuki & Prawoto, 2016). Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov kurang dari alpha 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya apabila lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan  $0,200 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

### *Uji Multikolinearitas*

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah di dalam model terdapat korelasi antar variabel independennya. Menurut (Ghozali, 2016) Cara untuk mnguji adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai VIF tersebut kurang dari 10 atau nilai tolerance  $> 0,01$  maka diantara varibel independennya tidak terdapat multikolinearitas dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas bahwa nilai tolerance value untuk variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar  $0,912 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,096 < 10$ . Variabel komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar  $0,717 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,396 < 10$ . Sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai tolerance value sebesar  $0,666 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,502 < 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolieritas dalam persamaan regresi berganda.

### *Uji Heteroskedastisitas*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  $0,946 > 0,05$ ; variabel komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  $0,925 > 0,05$  dan untuk variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  $0,338 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam persamaan regresi berganda.

### *Analisis Regeresi Linear Berganda*

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KAPD + \beta_2 KOPD + \beta_3 SPI + \varepsilon$$

Keterangan:

APDD	= Akuntansi Pengelolaan Dana Desa
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi
KAPD	= Kompetensi Aparat Desa
KOPD	= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
$\varepsilon$	= Standar error

### *Uji Koefisien Determinasi*

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan cara melihat seberapa besar masing-masing adjusted R square pada masing-masing variabel independen yang menunjukkan besarnya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan sebaliknya apabila nilai  $R^2$  bernilai besar (mendekati 1) variabel bebas bisa memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,409 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal sebesar 41% sedangkan sisanya 59% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

#### Uji Statistik F

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai F sebesar 16,910 dan hasil signifikansinya  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa (X1), komitmen organisasi pemerintah desa (X2) dan sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

#### Uji Statistik t

Untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik t yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas signifikansi maka kriteria penerimaan maupun penolakan hipotesis dapat ditentukan, apabila nilai probabilitas signifikansi  $< \alpha$ , maka hipotesis diterima dan apabila sebaliknya maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.  
Uji Statistik t

Model	Standardized Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)			,901	,371
KAD	,274		2,825	,006
KOPD	-,127		-1,161	,250
SPI	,581		5,119	,003

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 8. Tersebut maka uji hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi aparatur desa dengan signifikansi  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima artinya secara statistik kompetensi aparatur desa mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Variabel komitmen organisasi pemerintah desa dengan signifikansi  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak artinya secara statistik komitmen organisasi pemerintah desa tidak mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Variabel sistem pengendalian internal dengan signifikansi  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima artinya secara statistik sistem pengendalian internal mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis 1 melalui analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang artinya bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparat akan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2018) menyimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin baik kompetensi aparat desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

### Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis 2 melalui analisis statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya komitmen organisasi tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan (Mada et al., 2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis 3 melalui analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal maka akan semakin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sweetenia et al., 2019) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Simpulan dan Saran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil perhitungan serta hipotesis yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : Komitmen aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak melengkapi dengan metode wawancara sehingga jawaban respon masih rawan terhadap bias dan penelitian ini hanya mengambil sampel pada salah satu kecamatan saja. Penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melengkapi penelitian dengan metode wawancara agar meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan dan memperbaiki butir- butir pertanyaan kuesioner agar menghasilkan data yang lebih valid dan reliabel.

### **Daftar Rujukan**

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1).
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Dan Kecamatan Kapur IX). *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–15.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–65.

- Endrayani, K. S., Adiputra, M. P., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja ). *E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program BM SPSS 23* (8th, Cetakan ke VIII ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi 9*. Universitas Diponegoro.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106–115.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1), 1–10.
- Oka, Komang. Wulan. L., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit, dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. *E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5247/3977>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Perdana, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p17>
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.
- Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo). *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 5(2), 332–394.  
<http://ejournalstiamataram.ac.id>

- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–481.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>